ALSYS
Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan

e-ISSN : 2808-540X
p-ISSN : 2808-7119

Terindeks: Copernicus, Sinta 5, Dimensions, Scilit, Lens, Semantic Scholar, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/alsys.v6i3.9705

PERUBAHAN SOSIAL: RESPONS MASYARAKAT PRINGKUKU TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM URUSAN SOSIAL

Social Change: The Response of the Pringkuku Community to the Implementation of Program Urusan Sosial

Sumardi & Dian Tias Aorta
Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan
maridisumardi732@gmail.com; kilisuci.wicaksono@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 9, 2026	Apr 6, 2026	Apr 18, 2026	Apr 23, 2026

Abstract

This study was motivated by differences in community responses to the implementation of the Social Affairs Program in Pringkuku Subdistrict, which reflect the dynamics of social change as well as the gap between policy and field realities. This study aims to analyze community responses to the implementation of the Social Affairs Program in Pringkuku Village, Pringkuku Subdistrict, Pacitan Regency. This study used a qualitative approach with a descriptive-analytical type. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation, with informants selected purposively, including village officials, community leaders, and program beneficiaries. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. The results showed that community responses to the implementation of the social affairs program were diverse and were influenced by the level of public understanding of the program, the role of local leaders, and the suitability of the program to the needs and social values of the local community. In addition, the level of community participation in program planning, implementation, utilization of results, and evaluation became an important

AlSys is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

factor in determining the effectiveness of the implementation of the social policy. The conclusion of this study confirms that social programs at the village level should not be oriented only toward the provision of assistance, but must also be directed toward enhancing community capacity so that people can become economically and socially self-reliant. These findings contribute to strengthening the study of social policy, social change, and community participation, and confirm that the success of program implementation is strongly determined by the active involvement of the community in all stages of implementation.

Keywords: Social Policy; Community Participation; Social Change; Community Response; Community Empowerment

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan respons masyarakat terhadap implementasi Program Urusan Sosial di Kecamatan Pringkuku yang mencerminkan dinamika perubahan sosial serta kesenjangan antara kebijakan dan realitas di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons masyarakat terhadap implementasi Program Urusan Sosial di Desa Pringkuku, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, dengan informan yang dipilih secara *purposive*, meliputi perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga penerima program. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap implementasi program urusan sosial bersifat beragam dan dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap program, peran tokoh lokal, serta kesesuaian program dengan kebutuhan dan nilai sosial masyarakat setempat. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi program menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan sosial tersebut. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa program sosial di tingkat desa tidak cukup berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga harus diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu mandiri secara ekonomi dan sosial. Temuan ini berkontribusi pada penguatan kajian kebijakan sosial, perubahan sosial, dan partisipasi masyarakat, serta menegaskan bahwa keberhasilan implementasi program sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pelaksanaan.

Kata Kunci: Kebijakan Sosial; Partisipasi Masyarakat; Perubahan Sosial; Respons Masyarakat; Pemberdayaan Masyarakat

PENDAHULUAN

Desa Pringkuku merupakan salah satu wilayah yang mengalami dinamika sosial cukup kompleks, terutama terkait persoalan kesejahteraan Masyarakat (Firdaus et al., 2025), kemandirian ekonomi (Habibi & Kinseng, 2015), perlindungan kelompok rentan (Siagian & Subroto, 2024), serta akses terhadap layanan sosial (Nabilah et al., 2025). Kondisi ini mendorong pemerintah desa dan lembaga terkait untuk melaksanakan berbagai program urusan sosial**,** mulai dari bantuan berbasis kebutuhan dasar, pendampingan keluarga kurang

mampu (Sumbawati et al., 2020), layanan bagi penyandang disabilitas dan lansia (Sari et al., 2024), hingga program pemberdayaan ekonomi (Lastari & Prasetyanti, 2024) dan edukasi sosial (Wibowo et al., 2023). Program-program tersebut pada dasarnya dirancang untuk menjawab persoalan sosial di tingkat akar rumput serta mendorong terciptanya perubahan sosial yang lebih baik.

Namun, efektivitas sebuah program sosial (Pangera et al., 2025) tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program itu sendiri, tetapi sangat bergantung pada respons masyarakat sebagai penerima manfaat maupun pihak yang berinteraksi langsung dengan program (Indah et al., 2025). Dalam konteks masyarakat Pringkuku, respons tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk penerimaan, penolakan, adaptasi, dukungan, ataupun kritik. Respons ini tidak hanya mencerminkan persepsi masyarakat terhadap program, tetapi juga menggambarkan sejauh mana program tersebut mampu menyentuh kebutuhan nyata, membangun kesadaran sosial, dan mendorong perubahan dalam kehidupan sehari-hari.

Di sisi lain, perubahan sosial (Huraerah, 2025) yang muncul akibat implementasi program urusan sosial sering kali bersifat subtil atau getaran halus yang baru terlihat ketika diamati secara mendalam. Perubahan tersebut bisa berupa meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan desa (Uly et al., 2024), membaiknya akses terhadap layanan sosial (Habibi & Kinseng, 2015), tumbuhnya solidaritas sosial (Fathoni, 2024), penguatan ekonomi keluarga (Rosilawati et al., 2025), atau perubahan pola pikir terhadap isu kesejahteraan. Namun, perubahan juga dapat bersifat negatif, seperti munculnya ketergantungan bantuan (Siregar et al., 2025), kesenjangan persepsi antarwarga (Melinda et al., 2025), atau ketidakpuasan terhadap mekanisme pelaksanaan program (Rahmadeni & Septn, 2023).

Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana masyarakat Pringkuku menginterpretasi, merasakan, dan merespons program urusan sosial yang diterapkan. Melalui pemahaman tersebut, kita dapat melihat apakah program berjalan sesuai tujuan, atau justru menghadapi hambatan struktural dan kultural yang belum teratasi. Penelitian ini menjadi relevan karena memberikan gambaran yang lebih utuh tentang hubungan antara kebijakan sosial (Sarjito, 2023) di tingkat desa dengan realitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi masukan strategis bagi pemerintah desa dalam mengevaluasi, memperbaiki, atau merumuskan program sosial yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penelitian Fitria (Alim, 2019) mengenai implementasi program bantuan sosial pemberdayaan masyarakat pesisir dan pembudidayaan ikan pada dinas kelautan dan perikanan kabupaten poso, menyebutkan bahwa Pelaksanaan Program Bantuan Sosial dan Pembudidayaan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Poso dinilai belum efektif, yang tercermin dari lemahnya sosialisasi sehingga masyarakat penerima tidak memahami tujuan program secara jelas, komunikasi yang terbatas hanya pada tahap pengajuan hingga penerimaan bantuan, sikap implementor yang kurang adil karena distribusi bantuan lebih didasarkan pada kedekatan personal daripada ketentuan yang berlaku, serta minimnya koordinasi antarbidang dan dukungan aparatur lain dalam struktur birokrasi.

Menurut penelitian Zulfikar, di berbagai negara, baik berkembang maupun maju, menghadapi persoalan serupa seiring pertumbuhan jumlah penduduk, yaitu menurunnya kualitas pelayanan publik bagi warganya (Zulfikar et al., 2023). Di Indonesia, fenomena kemiskinan masih tampak jelas di sejumlah wilayah, termasuk Papua dan beberapa provinsi lain yang mencatat persentase penduduk miskin cukup tinggi seperti Papua (26,80%), Papua Barat (21,43%), Nusa Tenggara Timur (20,23%), Maluku (16,23%), Gorontalo (15,51%), dan Aceh (14,75%). Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan strategi peningkatan kesejahteraan yang lebih efektif. Salah satu pendekatan yang banyak diterapkan adalah pemberdayaan masyarakat. Sebuah penelitian menemukan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya memiliki peran strategis dalam memfasilitasi proses pemberdayaan tersebut, terutama melalui upaya mengubah pola pikir masyarakat serta memberikan bantuan kepada kelompok ekonomi lemah. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memahami dinamika pelaksanaan program. Temuan penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan masih belum optimal. Efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh motivasi dan kapasitas masyarakat penerima manfaat. Selain itu, terdapat berbagai kendala seperti lemahnya kesepakatan kolektif, kurangnya pemahaman masyarakat dalam memelihara dan memanfaatkan bantuan, serta terbatasnya anggaran program. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, direkomendasikan agar Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya terus meningkatkan efektivitas program melalui proses pemberdayaan yang lebih adaptif terhadap tingkat keberdayaan masyarakat. Evaluasi berkala juga diperlukan setelah setiap rangkaian kegiatan untuk memastikan adanya perkembangan nyata dalam kapasitas dan kemandirian masyarakat.

Riyani (Riyani & Abdullah, 2024) dalam penelitiannya mengenai persepsi masyarakat terhadap implementasi program CSR PT. Anugerah Bara Kaltim di Desa Purwajaya

Kecamatan Loa Janan mengemukakan bahwa Kalimantan Timur dikenal sebagai daerah dengan cadangan batu bara yang melimpah, sehingga komoditas ini menjadi sumber keuntungan besar bagi berbagai perusahaan pertambangan. Data BPS Kalimantan Timur menunjukkan bahwa batu bara menyumbang sekitar 45,14% pendapatan provinsi. Namun, kondisi ini tidak selalu sejalan dengan kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah yang dipenuhi konsesi tambang. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa aktivitas pertambangan, baik yang legal maupun ilegal, kerap menimbulkan persoalan lingkungan dan sosial bagi penduduk sekitar. Penelitian ini berfokus pada PT. Anugerah Bara Kaltim (PT. ABK) yang beroperasi di Kecamatan Loa Janan. Perusahaan tersebut menjalankan puluhan program CSR setiap tahunnya, mencakup program jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan persepsi masyarakat terhadap program-program CSR tersebut untuk menilai keberhasilan sekaligus mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. ABK mengembangkan program CSR di bidang ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan ketenagakerjaan. Sebagian besar masyarakat menilai program-program tersebut membawa manfaat positif, meskipun mereka juga mencatat adanya sejumlah kendala yang memerlukan perhatian lebih lanjut agar efektivitas dan keberlanjutan program meningkat. Temuan penting lainnya adalah masih adanya program yang bersifat karitatif sehingga belum sepenuhnya berorientasi pemberdayaan. Selain itu, program CSR pada aspek lingkungan belum secara langsung menanggapi dampak ekologis yang ditimbulkan oleh kegiatan Perusahaan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis respons masyarakat terhadap implementasi Program Urusan Sosial di tingkat desa dengan mengintegrasikan perspektif kebijakan sosial, perubahan sosial, dan partisipasi masyarakat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan evaluasi program dari sisi kebijakan atau administratif pemerintah, penelitian ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama yang memaknai, merespons, dan berpartisipasi dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman baru bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sosial di tingkat lokal tidak hanya ditentukan oleh desain program, tetapi juga oleh dinamika sosial, peran tokoh masyarakat, serta tingkat keterlibatan warga dalam setiap tahap pelaksanaan program.

Teori kebijakan sosial Paul Spicker digunakan dalam penelitian ini. Menurut Paul Spicker, kebijakan sosial dipahami sebagai rangkaian tindakan pemerintah yang bertujuan

mengatur, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui intervensi yang terstruktur (Spicker, 2014). Spicker melihat kebijakan sosial bukan sekadar kumpulan program teknis, tetapi juga cerminan nilai, moralitas publik, dan struktur kekuasaan yang memengaruhi kehidupan sosial. Dengan demikian, kebijakan sosial harus dipahami sebagai perangkat yang bekerja pada dua sisi sekaligus: melayani kebutuhan masyarakat dan pada saat yang sama mengatur dinamika sosial yang ada.

Selain Teori kebijakan sosial, juga digunakan Teori Perubahan Sosial Everett M. Rogers. Dalam pandangan Everett M. Rogers, perubahan sosial terjadi melalui proses difusi inovasi yakni menyebarnya sebuah gagasan, program, teknologi, atau praktik baru ke dalam tatanan sosial melalui interaksi antar anggota masyarakat (Rogers, 1983). Rogers menekankan bahwa perubahan tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui mekanisme komunikasi yang berlangsung terus-menerus antara pihak yang memperkenalkan inovasi dan masyarakat yang menjadi target perubahan. Karena itu, perubahan sosial sangat bergantung pada kemampuan suatu program untuk dipahami, diterima, dan dianggap relevan oleh masyarakat yang mengalaminya.

Teori partisipasi masyarakat yang dikembangkan oleh Cohen dan Uphoff merupakan salah satu kerangka paling komprehensif dalam memahami bagaimana masyarakat terlibat dalam proses pembangunan (Hutagalung, 2022). Keduanya melihat partisipasi bukan sebagai kegiatan tunggal yang berdiri sendiri, tetapi sebagai rangkaian proses sosial yang melibatkan masyarakat pada berbagai tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Perspektif ini menempatkan masyarakat bukan sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek yang memiliki peran aktif dalam menentukan keberhasilan program.

Penelitian tentang respons masyarakat terhadap program penerapan urusan sosial di Desa Pringkuku ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana respons masyarakat Desa Pringkuku terhadap program penerapan urusan sosial, juga menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial yang muncul sebagai hasil implementasi program tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Saleh, 2023) dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap realitas sosial secara mendalam, terutama menyangkut cara masyarakat memaknai, merasakan, dan merespons Program Penerapan Urusan Sosial di Desa Pringkuku. Metode ini

memungkinkan peneliti menggali pengalaman, persepsi, serta dinamika sosial yang muncul sebagai dampak dari program tersebut. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk memaparkan fenomena sebagaimana adanya, lalu menganalisisnya secara kritis berdasarkan teori kebijakan sosial, teori perubahan sosial, dan teori partisipasi masyarakat.

Penelitian dilakukan di Desa Pringkuku, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan. Lokasi ini dipilih secara sengaja (purposive) karena menjadi wilayah penerapan Program Urusan Sosial dan menunjukkan dinamika sosial yang relevan untuk dikaji, terutama terkait partisipasi masyarakat dan munculnya respons terhadap kebijakan sosial tingkat desa.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta dokumentasi lapangan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen desa, laporan pelaksanaan program, arsip kegiatan, serta literatur yang relevan terkait kebijakan sosial dan implementasi program sosial di tingkat desa. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih individu yang dianggap memiliki pengetahuan, keterlibatan, atau pengalaman terkait dengan pelaksanaan program. Informan penelitian meliputi perangkat desa seperti kepala desa, kaur kesejahteraan, dan pendamping sosial; tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh pemuda, serta kader PKK; masyarakat penerima program atau kelompok rentan; serta pihak lain yang dinilai memiliki informasi yang relevan mengenai implementasi program. Jumlah informan dalam penelitian ini bersifat fleksibel dan mengikuti prinsip saturasi data, yaitu proses pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak ditemukan lagi data atau informasi baru.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali secara rinci pemahaman, pengalaman, serta respons informan terhadap implementasi Program Urusan Sosial. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar tetap fokus pada topik penelitian namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk mengembangkan jawaban dan pengalaman mereka secara lebih luas. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan observasi partisipatif dengan mengamati secara langsung berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Program Urusan Sosial di lapangan, termasuk interaksi masyarakat, proses birokrasi di tingkat lokal, serta dinamika sosial yang muncul selama pelaksanaan program. Observasi ini penting untuk memahami konteks sosial yang

tidak selalu muncul dalam proses wawancara. Sementara itu, teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan, seperti laporan kegiatan, data administratif desa, foto kegiatan, serta arsip program yang berkaitan dengan implementasi kebijakan sosial tersebut. Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat temuan lapangan sekaligus memastikan validitas data penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Saleh, 2023), yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi data yang dianggap penting, menyederhanakan temuan penelitian, serta mengelompokkan informasi sesuai dengan tema-tema utama seperti respons masyarakat, efektivitas program, tingkat partisipasi, serta perubahan sosial yang muncul. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil temuan dalam bentuk uraian naratif, tabel, peta konsep, atau matriks agar memudahkan peneliti dalam memahami pola serta hubungan antar temuan penelitian. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses merumuskan temuan penelitian secara bertahap yang terus diverifikasi melalui data tambahan, diskusi dengan informan, serta teknik triangulasi hingga diperoleh kesimpulan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara empiris.

HASIL

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Pringkuku merupakan salah satu desa di Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan yang memiliki dinamika sosial cukup kompleks, terutama berkaitan dengan persoalan kesejahteraan masyarakat dan akses terhadap program-program sosial pemerintah. Sebagian masyarakat desa masih bergantung pada sektor pertanian, pekerjaan informal, serta usaha mikro skala rumah tangga.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah melalui program urusan sosial berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai bentuk bantuan dan pemberdayaan, seperti bantuan sosial, program pemberdayaan ekonomi keluarga, serta kegiatan pembinaan sosial. Program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan bantuan material, tetapi juga mendorong perubahan perilaku sosial menuju kemandirian masyarakat.

Namun dalam implementasinya, program tersebut memunculkan berbagai respons dari masyarakat. Ada kelompok masyarakat yang menerima dengan antusias, tetapi ada pula yang menunjukkan sikap pasif bahkan skeptis terhadap program tersebut. Oleh karena itu penelitian ini mencoba memahami secara mendalam bagaimana masyarakat memaknai dan merespons implementasi program tersebut.

Respon Masyarakat terhadap Implementasi Program Urusan Sosial

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti, respons masyarakat terhadap implementasi program urusan sosial dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk utama, yaitu respons positif, respons moderat, dan respons kritis.

1. Respons Positif

Sebagian masyarakat menunjukkan sikap positif terhadap program urusan sosial. Kelompok ini umumnya berasal dari keluarga penerima manfaat langsung yang merasakan dampak nyata dari program tersebut. Mereka menilai bahwa bantuan yang diberikan cukup membantu meringankan beban ekonomi keluarga.

Beberapa informan menyatakan bahwa program tersebut membantu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan anak, maupun perbaikan kondisi ekonomi keluarga. Selain itu, masyarakat juga menilai bahwa keberadaan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kondisi masyarakat kecil. Respons positif ini juga tercermin dari keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa maupun dinas sosial, seperti pelatihan keterampilan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, sebagian masyarakat juga menyadari bahwa bantuan sosial bersifat sementara sehingga mereka berharap adanya program yang lebih berorientasi pada pemberdayaan ekonomi jangka panjang.

2. Respons Moderat

Kelompok kedua adalah masyarakat yang menunjukkan respons moderat atau netral terhadap program tersebut. Mereka tidak menolak program, tetapi juga tidak menunjukkan antusiasme yang tinggi. Sikap ini biasanya muncul karena masyarakat menganggap program bantuan sosial sebagai sesuatu yang rutin dan sudah biasa terjadi dalam kebijakan pemerintah. Mereka menerima bantuan jika mendapatkannya, tetapi tidak terlalu aktif terlibat dalam proses program. Respons moderat ini juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap tujuan program. Sebagian masyarakat masih melihat bantuan sosial sebagai bentuk

bantuan langsung semata, bukan sebagai bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang bersifat pemberdayaan masih relatif terbatas.

3. Respons Kritis

Selain respons positif dan moderat, terdapat pula sebagian masyarakat yang menunjukkan sikap kritis terhadap implementasi program urusan sosial. Kritik tersebut umumnya berkaitan dengan beberapa aspek, seperti proses pendataan penerima bantuan, ketepatan sasaran program, serta transparansi pelaksanaan program.

Beberapa informan menyampaikan bahwa masih terdapat masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan namun belum terdata sebagai penerima manfaat. Sebaliknya, ada pula kasus di mana penerima bantuan dianggap kurang tepat sasaran menurut persepsi masyarakat. Kritik lainnya berkaitan dengan kurangnya sosialisasi program kepada masyarakat. Sebagian masyarakat merasa belum memperoleh informasi yang cukup mengenai tujuan, mekanisme, maupun manfaat program secara menyeluruh. Sikap kritis ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek program, tetapi juga mulai memiliki kesadaran untuk menilai efektivitas kebijakan sosial yang dijalankan pemerintah.

Faktor yang Mempengaruhi Respons Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap program urusan sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor utama.

1. Tingkat Pemahaman Masyarakat

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan mekanisme program sangat mempengaruhi sikap mereka terhadap program tersebut. Masyarakat yang memahami bahwa program bertujuan untuk pemberdayaan cenderung lebih aktif berpartisipasi dibandingkan masyarakat yang hanya melihatnya sebagai bantuan sesaat.

2. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi ekonomi keluarga juga menjadi faktor penting dalam membentuk respons masyarakat. Masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lebih rentan cenderung memberikan respons lebih positif karena mereka merasakan manfaat program secara langsung. Sebaliknya, masyarakat yang kondisi ekonominya relatif stabil cenderung bersikap lebih netral atau kurang terlibat dalam kegiatan program.

3. Peran Pemerintah Desa

Peran pemerintah desa dalam mensosialisasikan dan mengelola program sangat menentukan keberhasilan implementasi program. Pemerintah desa yang aktif melakukan komunikasi dengan masyarakat mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program sosial. Sebaliknya, kurangnya komunikasi dan transparansi dapat menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat.

4. Pengalaman Masyarakat terhadap Program Sebelumnya

Pengalaman masyarakat dalam mengikuti program-program sosial sebelumnya juga mempengaruhi respons mereka. Jika pengalaman sebelumnya dianggap bermanfaat, masyarakat cenderung lebih terbuka terhadap program baru. Namun jika pengalaman sebelumnya dianggap kurang berhasil, masyarakat bisa menjadi skeptis.

Tabel 1. Matriks Temuan Penelitian

Matriks Temuan Penelitian			
Fokus Penelitian	**Temuan Lapangan**	**Analisis**	**Implikasi**
Respons masyarakat terhadap program sosial	Respons masyarakat terbagi menjadi positif, moderat, dan kritis	Respons dipengaruhi oleh pengalaman sosial dan persepsi terhadap kebijakan	Program perlu meningkatkan komunikasi dan partisipasi masyarakat
Ketepatan sasaran bantuan	Sebagian masyarakat menilai bantuan belum sepenuhnya tepat sasaran	Proses pendataan masih memiliki keterbatasan	Diperlukan sistem pendataan yang lebih transparan dan partisipatif
Partisipasi masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat masih bervariasi	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan program	Sosialisasi program perlu ditingkatkan
Dampak sosial program	Program membantu kebutuhan dasar namun berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial	Distribusi bantuan mempengaruhi hubungan sosial masyarakat	Pengelolaan program harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial
Peran pemerintah desa	Pemerintah desa memiliki peran penting dalam implementasi program	Komunikasi yang baik meningkatkan kepercayaan masyarakat	Perlu penguatan kapasitas kelembagaan desa

Matriks temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi program sosial di tingkat desa menghasilkan dinamika yang kompleks, di mana respons masyarakat terbagi menjadi positif, moderat, dan kritis yang dipengaruhi oleh pengalaman sosial serta persepsi terhadap kebijakan, sementara ketepatan sasaran bantuan masih menghadapi kendala akibat

keterbatasan proses pendataan. Di sisi lain, partisipasi masyarakat yang bervariasi menunjukkan adanya kekurangan dalam pemahaman terhadap tujuan program, meskipun program telah memberikan dampak dalam pemenuhan kebutuhan dasar, namun juga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial akibat distribusi bantuan yang kurang merata. Dalam konteks ini, peran pemerintah desa menjadi sangat krusial karena kualitas komunikasi yang dibangun terbukti memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat, sehingga secara keseluruhan diperlukan peningkatan transparansi pendataan, penguatan sosialisasi, perluasan partisipasi, serta pengelolaan program yang lebih adil dan didukung oleh kapasitas kelembagaan desa yang kuat.

PEMBAHASAN

Implementasi program urusan sosial di Desa Pringkuku memberikan beberapa dampak sosial bagi masyarakat. Pertama, program ini membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi rendah. Bantuan sosial mampu meringankan beban ekonomi dalam jangka pendek. Kedua, program tersebut juga mendorong munculnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemberdayaan ekonomi keluarga. Melalui berbagai kegiatan pembinaan dan pelatihan, sebagian masyarakat mulai mencoba mengembangkan usaha kecil sebagai sumber pendapatan tambahan. Ketiga, program ini juga mempengaruhi hubungan sosial dalam masyarakat. Dalam beberapa kasus, program bantuan sosial dapat memperkuat solidaritas sosial, tetapi dalam kasus lain juga dapat menimbulkan kecemburuan sosial apabila proses distribusi bantuan dianggap tidak adil.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap implementasi program urusan sosial di Desa Pringkuku bersifat beragam. Variasi respons ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program sosial tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh bagaimana masyarakat memaknai dan berpartisipasi dalam program tersebut. Dalam perspektif pengembangan masyarakat, partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan program pemberdayaan. Program yang hanya berfokus pada distribusi bantuan tanpa melibatkan masyarakat secara aktif cenderung menghasilkan ketergantungan sosial.

Respons masyarakat terhadap kebijakan sosial dapat dijelaskan melalui teori respons sosial yang menyatakan bahwa sikap masyarakat terhadap suatu kebijakan dipengaruhi oleh

pengalaman, persepsi, serta kepentingan sosial mereka (Soekanto, 2013). Dalam konteks penelitian ini, respons positif muncul dari masyarakat yang merasakan manfaat langsung dari program, sedangkan respons kritis muncul dari masyarakat yang menilai terdapat ketidaksesuaian dalam implementasi program. Teori ini menunjukkan bahwa masyarakat bukan sekadar objek kebijakan, tetapi juga subjek yang memiliki kemampuan untuk menilai, menerima, atau bahkan mengkritisi kebijakan yang diterapkan.

Temuan penelitian ini juga dapat dianalisis melalui perspektif teori perubahan sosial (Rogers, 1983) yang menyatakan bahwa perubahan dalam struktur sosial masyarakat seringkali dipicu oleh intervensi kebijakan publik. Program urusan sosial yang dilaksanakan pemerintah merupakan salah satu bentuk intervensi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga dapat mengubah pola hubungan sosial, pola partisipasi masyarakat, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemberdayaan ekonomi. Namun perubahan sosial tidak selalu berlangsung secara linear. Dalam beberapa kasus, perubahan sosial dapat memunculkan resistensi atau kritik dari masyarakat apabila kebijakan yang diterapkan dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat, program sosial seharusnya tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu mandiri secara ekonomi dan sosial. Teori partisipasi masyarakat yang dikembangkan oleh Cohen dan Uphoff merupakan salah satu kerangka paling komprehensif dalam memahami bagaimana masyarakat terlibat dalam proses pembangunan (Hutagalung, 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program sosial sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan yang menekankan partisipasi aktif masyarakat menjadi strategi penting dalam mencapai tujuan pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, implementasi program urusan sosial seharusnya tidak hanya menekankan aspek bantuan, tetapi juga memperkuat aspek pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Dengan demikian masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga menjadi aktor utama dalam proses pembangunan sosial. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan sosialisasi program, transparansi pelaksanaan, serta

pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi program sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan sosial.

Keberagaman respons masyarakat terhadap implementasi Program Urusan Sosial menuntut adanya perbaikan dalam strategi komunikasi dan sosialisasi yang lebih partisipatif dan mudah dipahami, penguatan peran tokoh lokal sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat, serta peningkatan transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan program. Selain itu, penting bagi pemerintah desa dan instansi terkait untuk mengintegrasikan kebutuhan serta nilai sosial masyarakat dalam perencanaan kebijakan, sehingga program tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu mendorong partisipasi aktif dan menghasilkan dampak sosial yang berkelanjutan.

Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif dengan cakupan lokasi yang terbatas di Desa Pringkuku sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan secara luas, keterbatasan jumlah dan variasi informan yang dipilih secara purposive yang berpotensi memengaruhi keberagaman perspektif, serta ketergantungan pada data subjektif dari hasil wawancara dan observasi yang memungkinkan adanya bias persepsi dari informan maupun peneliti.

KESIMPULAN

Rengkuman Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai respons masyarakat terhadap implementasi program urusan sosial di Desa Pringkuku Kabupaten Pacitan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Respons masyarakat terhadap implementasi program urusan sosial menunjukkan variasi yang cukup beragam. Sebagian masyarakat memberikan respons positif karena mereka merasakan manfaat langsung dari program tersebut, terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Program bantuan sosial dianggap mampu memberikan dukungan sementara bagi masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi yang rentan.

2. Terdapat pula kelompok masyarakat yang menunjukkan respons moderat atau netral terhadap program tersebut. Kelompok ini pada umumnya tidak menolak keberadaan program, namun juga tidak menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa program bantuan sosial merupakan kebijakan rutin pemerintah yang

bersifat administratif sehingga tidak selalu mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan.

3. Sebagian masyarakat juga menunjukkan respons kritis terhadap implementasi program urusan sosial. Kritik yang muncul terutama berkaitan dengan proses pendataan penerima bantuan, ketepatan sasaran program, serta transparansi pelaksanaan program. Beberapa informan menyampaikan bahwa masih terdapat masyarakat yang membutuhkan bantuan namun belum terdata sebagai penerima manfaat. Kondisi tersebut menimbulkan persepsi adanya ketidaktepatan dalam distribusi bantuan sosial.

4. Implementasi program urusan sosial memberikan beberapa dampak sosial bagi masyarakat Sebagian masyarakat juga menunjukkan respons kritis terhadap implementasi program urusan sosial Respons masyarakat terhadap program urusan sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu tingkat pemahaman masyarakat terhadap tujuan program, kondisi sosial ekonomi keluarga, peran pemerintah desa dalam sosialisasi program, serta pengalaman masyarakat terhadap program sosial sebelumnya. Faktor-faktor tersebut membentuk cara masyarakat memaknai kebijakan sosial yang diterapkan oleh pemerintah.

5. Implementasi program urusan sosial memberikan beberapa dampak sosial bagi masyarakat. Program tersebut mampu membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar serta mendorong munculnya kesadaran tentang pentingnya pemberdayaan ekonomi keluarga. Namun demikian, dalam beberapa kasus program bantuan sosial juga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial apabila distribusi bantuan dianggap tidak adil oleh masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi program urusan sosial tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah semata, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat, kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta transparansi dalam pengelolaan program sosial.

Kontribusi terhadap Ilmu Pengetahuan

1. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan Sosiologi Perubahan Sosial dengan menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap kebijakan sosial bersifat beragam (positif, netral, dan kritis). Temuan ini menegaskan bahwa masyarakat bukan objek pasif, melainkan subjek aktif yang memaknai kebijakan berdasarkan pengalaman, kondisi sosial-ekonomi, dan tingkat pemahaman mereka.

2. Penelitian ini memperkaya kajian Komunikasi Sosial dengan menyoroti bahwa rendahnya partisipasi tidak selalu berarti penolakan, melainkan dapat disebabkan oleh persepsi program sebagai rutinitas administratif. Temuan ini menegaskan pentingnya komunikasi yang partisipatif dan edukatif dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat terhadap program sosial.

3. Penelitian ini berkontribusi pada studi Kebijakan Publik dengan menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh distribusi bantuan, tetapi juga oleh aspek keadilan, ketepatan sasaran, dan transparansi. Selain itu, penelitian ini menambahkan dimensi analisis dampak sosial, termasuk potensi munculnya kecemburuan sosial sebagai konsekuensi dari implementasi kebijakan yang tidak merata.

Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi program urusan sosial di masyarakat.

1. Pemerintah desa dan instansi terkait perlu meningkatkan intensitas sosialisasi program kepada masyarakat. Sosialisasi yang lebih terbuka dan komunikatif akan membantu masyarakat memahami tujuan, mekanisme, serta manfaat program secara lebih komprehensif. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi secara lebih aktif dalam berbagai kegiatan pemberdayaan.

2. Proses pendataan penerima bantuan sosial perlu dilakukan secara lebih transparan dan partisipatif. Pemerintah desa dapat melibatkan tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam proses verifikasi data sehingga ketepatan sasaran program dapat lebih terjamin.

3. Program urusan sosial sebaiknya tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan material, tetapi juga perlu diperkuat dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pelatihan keterampilan, pendampingan usaha kecil, serta pengembangan ekonomi lokal dapat menjadi strategi yang lebih berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Pemerintah desa perlu memperkuat mekanisme komunikasi dan dialog dengan masyarakat. Forum musyawarah desa atau kegiatan pertemuan masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai ruang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program sosial.

5. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai dampak jangka panjang program bantuan sosial terhadap kemandirian ekonomi

masyarakat. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji hubungan antara program bantuan sosial dengan dinamika perubahan sosial di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Alim, F. Y. (2019). Implementasi Program Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidayaan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie, 12*(1).

Fathoni, T. (2024). Konsep Solidaritas Sosial dalam Masyarakat Modern perspektif Émile Durkheim. *Journal of Community Development and Disaster Management, 6*(2), 129–147. https://doi.org/10.37680/jcd.v6i2.6402

Firdaus, N. A., Widiantoro, C. E., & Purwandari, T. (2025). Analisis Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia Berdasarkan Klasterisasi Sosial-Ekonomi Menggunakan Fuzzy C-Means. *BIAStatistics Journal Of Statistics Theory And Aplication Special Issue, 5*(1), 21–32. https://biastatistics.statistics.unpad.ac.id/?journal=biastatistics-special-issue&page=article&op=view&path%5B%5D=305

Habibi Siregar, F., & Kinseng, R. A. (2015). The changes of social culture and the level of migrant welfare Batak who worked in the informal sector in Bogor. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, 3*(1). https://doi.org/10.22500/sodality.v3i1.9428

Hutagalung, S. S. (2022). *Buku Ajar Partisipasi dan Pemberdayaan di Sektor Publik*. Literasi Nusantara Abadi.

Indah, N., Simon, J., & Saragi, S. (2025). Persepsi Masyarakat terhadap Program Keluarga Harapan di Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat. *Jurnal Publik Reform, 12*(1), 18–29. https://doi.org/10.46576/jpr.v12i1.6335

Lastari, & Prasetyanti, R. (2024). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang. *Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik, 6*(1), 27–40. https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/jpap/article/view/786

Melinda, M., Fribadi, N. A., & Putri, A. T. (2025). Persepsi Masyarakat dan Pengemis terhadap Bantuan Sosial di Kota Serang. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 5*(1), 666–671. https://doi.org/10.56799/peshum.v5i1.13267

Nabilah, H., El-Tsana, A. V., & Wasir, R. (2025). Menutup kesenjangan kesehatan: Peningkatan kesetaraan akses dan kualitas layanan kesehatan. *Indonesian Journal of Health Science, 5*(3), 511–518. https://doi.org/10.54957/ijhs.v5i3.1511

Pangera, A. M. F. H. T., Kamaruddin, S. A., & Awaru, A. O. T. (2025). Dampak dan Efektivitas Program Bantuan Sosial dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal, 6*(3), 3580–3592. https://doi.org/10.54373/imeij.v6i3.3171

Rahmadeni, Y., & Septian, D. (2023). Mekanisme Penyelesaian Konflik pada Program Bantuan Subsidi Meteran Listrik Pasang Baru di Pulau Semembang Desa Semembang. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education, 10*(2), 61–72. https://doi.org/10.24036/scs.v10i2.450

Riyani, & Abdullah, Z. (2024). Persepsi Masyarakat terhadap Implementasi Program CSR PT. Anugerah Bara Kaltim di Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan. *eJournal*

Pembangunan Sosial, 12(2), 180–193. https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2024/06/Persepsi%20Masyarakat%20Terhadap%20Implementasi%20Program%20CSR%20%28Riyani%29-1%20%2806-27-24-09-32-33%29.pdf

Rogers, E. M. (1983). *Diffusion of innovations* (3rd ed.). Free Press.

Rosilawati, Wahyudin, U., Kamil, M., Komar, O., & Shantini, Y. (2025). Transformasi Ekonomi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan: Kewirausahaan dalam Pembuatan Cilok dan Kripik di Kelurahan Dago Kota Bandung. *SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 15*(1), 58–78. https://doi.org/10.33007/ska.v15i1.3443

Saleh, S. (2023). *Mengenal Penelitian Kualitatif: Panduan bagi Peneliti Pemula*. Agma.

Sari, Y., Purnamaningsih, P. E., & Yudartha, I. P. D. (2024). Kinerja Dinas Sosial dalam Menangani Disabilitas Lanjut Usia Melalui Program Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kota Denpasar. *Ethics and Law Journal: Business and Notary, 2*(1), 243–257. https://doi.org/10.61292/eljbn.132

Sarjito, A. (2024). Efektivitas Kebijakan Sosial dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Angka Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora, 6*(2), 1–12. https://doi.org/10.36624/jisora.v6i2.90

Siagian, J. P., & Subroto, M. (2024). Perempuan Sebagai Kelompok Rentan. *Jurnal Educatio, 10*(1), 173–178. https://doi.org/10.31949/educatio.v10i1.6940

Siregar, S. M., Firmando, H. B., Silaban, R. K., Sitorus, M., & Simbolon, J. W. (2025). Ketergantungan dan Perubahan Sosial: Studi Sosiologis Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Masyarakat di Desa Sibaruangkecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba. *IKRAITH-EKONOMIKA, 8*(2), 1380–1387. https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/view/5194

Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar* (Edisi revisi). Rajagrafindo Persada.

Spicker, P. (2014). *Social policy: Theory and practice* (3rd ed.). Policy Press. https://doi.org/10.51952/9781447316138

Sumbawati, N. K., Asmini, Juliawati, H., & Pamungkas, B. D. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ropang. *Jurnal Ekonomi & Bisnis, 8*(3), 194–203. https://doi.org/10.58406/jeb.v8i3.570

Uly, M. N., Rifai, M., & Febriantin, K. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus: Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10*(22), 839–846. https://doi.org/10.5281/zenodo.14577127

Wibowo, H., Nurdin, M. F., Nurwati, N., Gunawan, W., Rachim, H. A., Fedryansyah, M., Yunita, D., Nugraha, A. M., & Lesmana, A. C. (2023). Edukasi Masyarakat dalam rangka meningkatkan kapasistas Keberfungsian Sosial Masyarakat Desa Dayeuhkolot Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), 4*(3), 123–131. https://doi.org/10.24198/jppm.v4i3.51582

Zulfikar, Rozaili, & Marjani, N. (2023). Efektivitas Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli, 6*(1), 246–256. https://doi.org/10.47647/jsh.v6i1.1556